

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Usul Bantuan Tunai Menguat Selama Pandemi

Bantuan dalam bentuk tunai dinilai lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan agar bantuan sosial bagi masyarakat yang terimbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diubah menjadi bantuan langsung tunai. Ia menilai bantuan berupa uang jauh lebih mudah dan cepat disalurkan dibanding santunan berupa bahan pokok. “Kalau (bahan pokok) lama, kasih uang saja biar masyarakat

enggak kelaparan,” ujarnya, kemarin.

Pemerintah menjalankan pembatasan berskala besar untuk mencegah penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin, pemerintah DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah menyalurkan 1.194.633 paket bahan pokok. Bantuan itu berupa beras lima kilogram, makanan berprotein dua kaleng, biskuit dua bungkus, minyak goreng 0,9 liter satu bungkus, masker kain dua helai, dan dua batang sabun mandi.

Pendistribusian bantuan

dilakukan selama 9-25 April 2020. Padahal sebelumnya ditargetkan bantuan tahap pertama itu rampung pada 24 April lalu. Keterlambatan itu terjadi karena Pasar Jaya sempat kesulitan mendapatkan pasokan bahan pokok yang menjadi isi santunan. Penyaluran bantuan juga terhambat karena tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengemasan paket bantuan sangat terbatas.

Suhaimi mengatakan, jika bantuan itu diberikan dalam uang bentuk tunai, bisa disalurkan melalui Bank DKI sehingga santunan tinggal membuka

rekening di Bank DKI atau pemerintah Jakarta yang membuat rekening bagi mereka. “Yang penting data penerima bantuan transparan dan dasar hukumnya jelas,” tuturnya.

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Penanganan Covid-19 disebutkan, pemerintah DKI dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk yang rentan terkena dampak pelaksanaan limitasi. Bantuan itu diberikan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan langsung lainnya dengan mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan.

Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Jakarta Mujiyono memberi usul serupa. Apalagi, menurut dia, penyaluran bantuan bahan pokok yang diberikan pemerintah DKI meleset dari jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Mujiyono, ada sejumlah keuntungan jika bantuan sosial diubah dalam bentuk tunai atau *cash transfer*. Di antaranya biaya

distribusi dan pengemasan paket bisa dihilangkan, sehingga santunan yang diberikan kepada masyarakat menjadi optimal.

Kelebihan lainnya, Mujiyono melanjutkan, melalui bantuan tunai, masyarakat bisa menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama masa pandemi. “Pemberian bantuan dalam bentuk tunai juga akan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho juga sependapat. Bahkan dia menilai, pemberian bantuan tunai justru dapat menggerakkan perekonomian lokal. Hal itu serupa dengan pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dapat dibelanjakan sejumlah kebutuhan di toko-toko.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah belum memberikan tanggapan atas usul sejumlah kalangan itu. Pertanyaan Tempo tak ia jawab hingga tenggat tulisan terlewat.

● GANGSAR PARIKESIT | TAUFIQ SIDDIQ | IMAM HAMDI